

PERAN LURAH DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL PASCA PENGHENTIAN PENGELOLAAN TAMBANG DI KELURAHAN DONDANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Leny Koesliana¹, Erwin Resmawan², Letizia Dyastari³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Peran Lurah Dalam Penanggulangan Dampak Sosial Pasca Penghentian Pengelolaan Tambang di Kelurahan Dondang Kabupaten Kutai Kartanegara. Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yang di awali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, penelitian, wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Lurah dalam Menanggulangi Dampak Sosial Pasca Penghentian Tambang dikelurahan Dondang sudah Optimal. Dilakukan melalui pengembangan kreatifitas Ibu-ibu PKK, Penyuluh Pertanian Lapangan kepada kelompok tani, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada program pembangunan, Memberi peluang serta kesempatan kepada masyarakat dalam mengusulkan program pembangunan melalui pramusrembang dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berswadaya dan gotong-royong dalam pembangunan. Faktor Penghambat Peran Lurah dalam Penanggulangan Dampak Sosial Pasca Penghentian Pengelolaan Tambang di Kelurahan Dondang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki, partisipasi penduduk merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Lurah dan Kemampuan SDM yang belum memadai.

Kata Kunci: Peran, lurah, dampak, sosial, pengelolaan, tambang

Pendahuluan

Diberlakukannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin menegaskan bahwa pemerintahan daerah

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: lenykoesliana@gmail.com

² Pembimbing I Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Pembimbing II Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah apabila didekatkan dengan yang diperintah (rakyat) akan dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, karena dari kebijakan yang di buat akan dapat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat yang dilayaninya. Dalam hal ini pemerintah lokal lebih mampu dari pada pemerintah pusat dalam merespon segala perubahan tuntutan, melakukan eksperimen dan mengantisipasi perubahan-perubahan pada masa mendatang.

Pemerintah lokal memberikan bentuk pemerintahan dimana rakyat dari kelompok non prosuderal dapat lebih mudah berpartisipasi. Kelurahan sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh Negara. Pembangunan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat kehidupan sosial ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan yang bersifat multi aspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar desa sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Masuknya pertambangan batu bara di Kelurahan Dondang yang merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Kutai Kartanegara dengan potensi daerah dengan produksi batubara yang cukup besar. Hasil produksi ini yang banyak dipasarkan keberbagai wilayah. Berbagai dampak yang ditimbulkan akibat penambangan batubara yang dihubungkan dengan persepsi masyarakat terhadap kondisi sosial dan juga lingkungan masyarakat.

Dampak dari pasca pengelolaan tambang batu bara yang ada di Kelurahan Dondang Kabupaten Kutai Kartanegara akibat dari aktivitas pertambangan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap kondisi sosial serta fisik daerah sekitarnya, baik dampak positif maupun negatif. Dampak sosial dapat dikategorikan ke dalam kelompok kelompok *realimpact* dan *special impact*. *Real impact* adalah dampak yang timbul sebagai akibat dari aktivitas proyek, pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pascaoperasi, misalnya migrasi penduduk, kebisingan atau polusi udara. *Specialimpact* adalah suatu dampak yang timbul dari persepsi masyarakat terhadap resiko dari adanya proyek.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kelurahan Dondang Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi lokasi penelitian. Mata pencaharian masyarakat Kelurahan Dondang sebelum masuknya pertambangan batu bara di desa Dondang hampir setengah dari masyarakat bermata pencaharian di bidang pertanian khususnya petani padi dan perkebunan, namun ketika pertambangan mulai masuk di wilayah Kelurahan Dondang, banyak masyarakat beralih bekerja pada sektor pertambangan, akan tetapi tidak selamanya masyarakat bergantung pada pertambangan, ketika terjadi penutupan area tambang maka dampak yang

ditimbulkan secara langsung adalah, bertambahnya pengangguran, kerusakan lingkungan hingga hilangnya lahan pertanian yang pada awalnya merupakan mata pencaharian utama masyarakat setempat dan tutupnya usaha-usaha warung disekitar tambang. Dengan demikian maka persoalan sosial akan muncul dan perlu penanganan khusus untuk menanggulangi masalah tersebut.

Kondisi yang peneliti amati di Kelurahan Dondang peneliti menemukan berbagai persoalan yang ada di masyarakat yang diakibatkan dari penghentian pengelolaan tambang batu bara di Kelurahan Dondang yaitu, meningkatnya angka pengangguran sehingga memicu terjadinya kriminalitas seperti pencurian, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Lurah Dondang. tercatat dalam kurun waktu satu bulan terakhir hampir lima kali terjadi kasus pencurian, masalah lain yang timbul adalah tingkat kepedulian warga terhadap lingkungan sekitar sangat rendah, hal ini dapat dilihat ketika akan diadakan kegiatan gotong royong masyarakat cenderung bersikap acuh tak acuh.

Pasca penghentian pengelolaan pertambangan batu bara di Kelurahan Dondang menimbulkan dampak sosial kepada masyarakat berupa hilangnya potensi pendapatan masyarakat karena alih fungsi lahan pertanian, dan berdasarkan data yang peneliti peroleh menunjukkan angka pengangguran yang mencapai 10,22 % pada tahun 2016 dikarenakan ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan dan ketika aktifitas pertambangan dihentikan maka berpengaruh pada kehidupan masyarakat sekitar tambang, tercatat untuk daerah wilayah tambang seperti DiKelurahan Dondang mengalami peningkatan yang sebelumnya di tahun 2015 hanya 7,5 % dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 8,5 % (*Sumber : data Badan Pusat Statistik Kab. Kutai Kartanegara 2015-2016.*)

Untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana, dapat dilakukan dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui partisipasi aktif yang difasilitasi dengan adanya penggerak dari pemberdayaan tersebut. Penggerak pemberdayaan ialah seseorang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dalam suatu wilayah. Peran utama seorang pemimpin ialah dapat mempengaruhi orang lain untuk secara sukarela mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pemberdayaan terhadap para petani yang masih sangat minim mengenai pemanfaatan lahan bekas tambang untuk kembali ditanami oleh petani agar dapat mengurangi dampak dari pertambangan itu sendiri. Sehingga dibutuhkan pemberdayaan yang memang perlu dilakukan untuk mengembalikan lingkungan dan lahan pertanian agar bisa kembali dimanfaatkan oleh warga sekitar tambang. Di Kelurahan Dondang tercatat ada 16 kelompok tani. Perhatian dan pemberdayaan perlu ditujukan kepada kelompok ini. Masyarakat lapisan bawah perlu di berdayakan karena masih mencerminkan adanya kelemahan dan kekurangan dan ke swadayaan, kemandirian, partisipasi, solidaritas sosial dan keterampilan.

Mengamati pentingnya Peran Lurah dalam penanggulangan dampak sosial pasca penghentian tambang di Kelurahan Dondang Kabupaten Kutai Kartanegara agar terciptanya kehidupan sosial ekonomi yang cepat dalam semua aspek

tertentu masalahnya tidak terlepas dari Peran lurah serta para perangkatnya yang ada di Kelurahan dimana pada umumnya memiliki sedikit sekali bekal pengetahuan yang memadai mengenai manajemen dampak sosial pasca tambang baru bara, sehingga rata-rata perkembangan kehidupan sosial berjalan agak lamban, selain itu juga belum optimalnya peran aktif kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sosial karena kurang efektifnya pelaksanaan fungsi Lurah, serta kurangnya daya dukung infrastruktur sarana dan prasarana juga membuat kondisi masyarakat semakin terpuruk. Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis menganggap penting dan tertarik untuk menjadi bahan penelitian, dengan judul “Peran Lurah Dalam Penanggulangan Dampak Sosial Pasca Penghentian Pengelolaan Tambang di Kelurahan Dondang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kerangka Dasar Teori

Peran

William dan Rawlin (2006:293) pengertian peran adalah cara individu memandang dirinya secara utuh meliputi fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Soekanto (2002:98), peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Lebih lanjut Horton dan Hunt (2003:65), peran (*role*) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (*nature*) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya.

Dampak Sosial

Dampak Sosial adalah proses sosial yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat, berkaitan dengan pergeseran fungsi sistem dan struktur sosial sehingga mengubah pola perilaku anggota masyarakat. Dampak sosial juga merupakan pengaruh akibat dari suatu kejadian, keadaan, kebijakan sehingga mengakibatkan perubahan maupun yang bersifat negatif bagi lingkungan sosial dan keadaan sosial.

Soenardjo (2002:32) dampak sosial merupakan dampak yang diakibatkan dari berbagai hal yang terjadi pada lingkungan sekitar, dan dapat disebabkan dari perubahan kondisi dan perubahan iklim yang terjadi di wilayah tersebut. Beratha (2004 : 40) Dampak sosial adalah suatu perubahan yang dirasakan secara berkala atau melalui proses terjadinya suatu gejala atau kondisi yang terjadi.

Menurut Adimihardja dan Harry (2001:15) konsep gerakan penanggulangan dampak sosial pertambangan dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (dari, oleh, dan untuk masyarakat), dan salah satu cara yang dipakai dalam teknik pemberdayaan ialah: *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Lebih lanjut Harry menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan

gerakan pemberdayaan ada beberapa aspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan, seperti: (1) Perumusan konsep, (2) Penyusunan model, (3) Proses perencanaan, (4) Pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan.

Perubahan Sosial

Perubahan sosial dapat dikatakan sebagai perubahan yang terjadi didalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan. Sztompka, (2010:5) berpendapat bahwa perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antara individu, kelompok, organisasi, kultur dan masyarakat pada waktu tertentu. Soemardjan (2007:192) mengatakan segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi system sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Koenig, (2004:45) Perubahan sosial dalam masyarakat dapat dibedakan kedalam beberapa bentuk yaitu :

1. Perubahan lambat (*Evolusi*)
2. Perubahan Cepat (*Revolusi*)
 - a. Harus ada keinginan dari masyarakat banyak untuk mengadakan perubahan. Didalam masyarakat harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan dan harus ada keinginan untuk mencapai keadaan yang lebih baik.
 - b. Ada seorang pemimpin atau sekelompok orang yang mampu memimpin masyarakat untuk mengadakan perubahan.
 - c. Pemimpin harus dapat menampung keinginan atau aspirasi dari rakyat untuk kemudian merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu program kerja.

Kelurahan

Bintaro (2002:95) Kelurahan adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis dan kultural yang didalamnya terdapat hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Peraturan pemerintah republik Indonesia No. 73 tahun 2005 tentang pemerintahan kelurahan yang merupakan dasar dalam menuju masyarakat yang berkembang yaitu kelurahan tidak lagi menjadi level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi masyarakat mandiri. Sehingga setiap masyarakat yang berada pada lingkungan kelurahan berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan kepentingan sendiri. Di sini harus dipahami bahwa kelurahan merupakan suatu kesatuan hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan melayani semua kebutuhan serta kepentingan masyarakatnya menuju kesejahteraan.

Pemerintahan Kelurahan

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 229 tentang kelurahan menyebutkan bahwa Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Wali Kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Kemudian pengertian Pemerintahan Kelurahan sendiri, menurut Hurgronje (2009:21), yaitu kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan.

Tambang dan Bahan Galian

Definisi bahan galian menurut Manan dan Saleng (2004:39) ialah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batuan mulia seperti emas yang merupakan endapan-endapan alam. Kemudian karakteristiknya berupa: benda padat, cair, dan gas yang keadaannya masih dalam bentuk endapan alam yang letaknya alam yang melekat pada batuan induknya dan belum terjamah oleh manusia.

Pengertian Penggolongan Batubara

Menurut Sukandarrumidi (2005:191) salah satu jenis bahan tambang adalah batubara. Istilah batubara merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *coal*. Batubara merupakan suatu campuran padatan heterogen yang terdapat dialam dalam tingkat / grade yang berbeda dari lignit, subbitumine, antarasi. Sedangkan pengertian batubara menurut Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara BAB 1 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Dampak Pertambangan Batubara

Menurut Salim (2005:195), walaupun batubara mempunyai kegunaan yang sangat strategis, namun keberadaan industri pertambangan batubara menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif . Dampak positif merupakan pengaruh dari adanya pertambangan batubara terhadap hal-hal yang bersifat praktis (nyata) dan konstruktif (membangun).

Dampak positif dari pertambangan batubara di Indonesia adalah :

1. Membuka daerah yang terisolasi dengan dibangunnya jalan pertambangan dan pelabuhan,
2. Sumber devisa negara, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Sumber energi alternatif untuk masyarakat lokal.
4. Menampung tenaga kerja.

Dampak negatif pertambangan batubara merupakan pengaruh yang kurang baik dari adanya industri pertambangan batubara. Dampak negatif pertambangan batubara di Indonesia, yaitu :

1. Sebagian perusahaan pertambangan yang dituding tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.
2. Penebangan hutan untuk kegiatan pertambangan.
3. Limbah kegiatan pertambangan yang mencemari lingkungan.
4. Areal bekas pertambangan yang dibiarkan menganga.
5. Sengketa lahan pertambangan dengan masyarakat sekitar.

Penanggulangan Dampak Sosial Pengelolaan Batu Bara

Teknik penanggulangan dampak sosial pertambangan saat ini sangat diperlukan semua pihak, karena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dari luar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut biasanya karena tidak pernah mengikut sertakan partisipasi masyarakat (*top down*), sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakat didaya gunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan kata lain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktif.

Menurut Wahab (2002: 81-82) ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan dalam penanggulangan dampak sosial pertambangan, yaitu:

1. Memanfaatkan potensi sumberdaya untuk Kepentingan Pembangunan, yaitu memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kepentingan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dalam program pembangunan, dalam arti menerima setiap aspirasi masyarakat yang datang dalam penyelenggara pembangunan dalam rangka mewujudkan kehidupan demokrasi.
3. Pemberdayaan masyarakat secara berswadaya dan gotong- royong dalam kegiatan Pembangunan, yaitu menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan secara terpadu, baik berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong-royong masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2014: 7) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Lurah Dalam Penanggulangan Dampak Sosial Pasca Penghentian Pengelolaan Tambang di Kelurahan Dondang Kabupaten Kutai Kartanegara
 - a) Memanfaatkan potensi sumberdaya, melalui pertanian dan perkebunan di lahan bekas tambang batu bara.
 - b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk mengatasi dampak sosial yang ditimbulkan dari pertambangan.
 - c) Pemberdayaan masyarakat secara berswadaya dan gotong- royong dalam perbaikan jalan yang rusak akibat kegiatan pertambangan.
2. Faktor penghambat Peran Lurah Dalam Penanggulangan Dampak Sosial Pasca Penghentian Pengelolaan Tambang di Kelurahan Dondang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil Penelitian

Peran Lurah Dalam Penanggulangan Dampak Sosial Pasca Penghentian Pengelolaan Tambang di Kelurahan Dondang Kabupaten Kutai Kartanegara Memanfaatkan Potensi Sumberdaya Untuk Kepentingan Pembangunan melalui Pertanian dan Perkebunan di Lahan Bekas Tambang

Dengan kondisi dan keadaan potensi sumber daya yang ada di Kelurahan dalam meningkatkan pembangunan serta pendapatan masyarakat agar masyarakat dapat mandiri, ada berapa yang di kembangkan oleh lurah sebagai fokus dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat yaitu bidang pertanian dan perkebunan sehingga konsentrasi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang menggali serta memanfaatkan potensi sumberdaya lebih di prioritaskan pengembangan pertanian dan perkebunan

Dalam memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan adanya perhatian lurah pada masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan, baik dari cara bercocok tanam yang baik dengan mendatangkan tenaga petani penyuluh lapangan (PPL) , agar masyarakat dapat pengetahuan tentang bercocok tanam.

Masyarakat sangat menyambut dengan baik program yang di lakukan lurah dalam menggali serta memanfaatkan potensi-potensi sumberdaya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat melalui bantuan penyediaan bibit, bantuan pemeliharaan dengan adanya pestisida, hal ini sangat efektif di lakukan dalam rangka mencapai suatu kemandirian masyarakat ketika pertaniannya dapat berhasil, dan lahan yang tadinya rusak akibat pertambangan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat menjadi lahan pertanian.

Selain di bidang pertanian dan perkebunan, Upaya lurah dalam menggali serta memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada untuk pembangunan di Kelurahan Dondang, juga memfasilitasi Ibu-ibu PKK dalam kegiatan kelpmk berocok tanam sehingga dapat menciptakan suatu peluang usah dan lurah juga memberikan bantuan kepada kelompok tani agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam menggali serta memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kepentingan pembangunan di Kelurahan salah satunya dilakukan lurah yaitu memberdayakan masyarakat tani dengan cara mendatangkan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan agar petani-petani mendapat pengetahuan baru serta mempraktkannya guna untuk meningkatkan hasil pertanian, dan dalam usaha untuk meningkatkan hasil pertanian.

Peran lurah dalam menggali serta memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kepentingan pembangunan di Kelurahan sudah berjalan dengan baik, yang dilakukan lurah yaitu dengan cara pengembangan kreatifitas Ibu-ibu PKK dalam kelompok bercocok taman sudah berjalan dengan baik yang terlibat di dalam hal ini ibu-ibu yang terutama memiliki kemauan dan mempunyai potensi dan memberdayakan masyarakat tani dengan cara mendatangkan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan agar petani-petani mendapat pengetahuan baru serta mempraktkannya guna untuk meningkatkan hasil pertanian.

Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

a. Menampung aspirasi masyarakat

Peran lurah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat dalam penanggulangan dampak sosial dari aktivitas pertambangan, dalam hal ini lurah mempunyai posisi ganda selain menjalankan roda pemerintahan yang ada di Kelurahan, lurah juga harus menerima setiap aspirasi masyarakat yang datang yang maksudnya bahwa lurah serta aparat Kelurahan juga bertindak sebagai wadah atau tempat untuk menyampai usulan serta masukan yang berkaitan dengan berbagai persoalan yang di Kelurahan dan yang dihadapi masyarakat di lapangan agar usulan-usulan masukan tersebut dapat direspon oleh lurah selaku penyelenggara pembangunan di Kelurahan dalam rangka mewujudkan kehidupan demokrasi guna meningkatkan kehidupan masyarakat Kelurahan.

Lurah dalam menjalankan program penanggulangan dampak sosial dari aktivitas pertambangan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat dengan adanya yang mengusulkan menyangkut rehab atau perbaikan saluran irigasi, program perbaikan jalan, oleh karena itu lurah dalam menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat di buktikan dengan mengutamakan kepentingan umum dalam program penanggulangan dampak sosial dari aktifitas pertambangan.

Lurah dalam menampung aspirasi masyarakat dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih ada program yang terhambat dikarenakan terbatasnya sumber daya yang dimiliki karena perangkat Kelurahan kebanyakan hanya lulusan SD-SMP sehingga dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sangat terbatas.

Dalam penanggulangan dampak sosial yang timbul seperti kasus kriminal yang meningkat pihak kelurahan sebenarnya sudah menyiapkan beberapa program penyuluhan mengenai pemanfaatan lahan bekas tambang dengan melalui

kegiatan pertanian, hal ini disambut antusias oleh masyarakat setempat, dan tentunya program-program tersebut diharapkan bisa menekan dampak sosial yang timbul.

Lurah menjalankan tugas dan fungsinya di lihat dari indikator menampung aspirasi masyarakat dalam program penanggulangan dampak sosial dari aktifitas pertambangan telah berjalan dengan baik, cara atau hal yang dilakukan lurah kepada masyarakat yaitu memberi peluang serta kesempatan kepada masyarakat dalam mengusulkan program melalui pramusrenbang Kelurahan dan memuatkannya dalam program pembangunan Kelurahan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan sehingga masyarakat terlibat langsung dalam memajukan pembangunan yang ada di Kelurahan.

b. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Menyalurkan aspirasi masyarakat juga merupakan salah satu fungsi dari lurah bagaimana aspirasi yang sebelumnya di tampung dalam wadah musyawarah atau musrenbang yang telah di adakan baik di tingkat Rukun Tetangga, Desa maupun Kelurahan.

Peran lurah sebagai aparat Sentral dalam melaksanakan serta pimpinan sudah menjalankan dengan baik, program pembangunan sesuai dengan apa yang masyarakat sampaikan dengan mengacu permasalahan yang terjadi dilapangan, pada umumnya masyarakat mengusulkan program pembangunan infrastruktur seperti pembuatan pembukaan jalan baru, pengerasan jalan, pengaspalan jalan, semenisasi lorong, pembuatan parit / *drainase*, gorong-gorong jembatan kayu menjadi permanen, lurah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di muatkan dalam program perencanaan pembangunan Kelurahan, dengan demikian pembangunan sesuai dengan apa yang di inginkan serta menjadi kebutuhan masyarakat dan diharapkan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Secara Berswadaya Dan Gotong-Royong Dalam Kegiatan Pembangunan

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat secara berswadaya dan gotong-royong, lurah terlebih dahulu menginformasikan kepada ketua-ketua RT yang ada di Kelurahan agar dapat mengumumkan kepada masyarakat agar masyarakat dapat hadir dalam bergotong royong membersihkan lingkungan Kelurahan. Lurah dalam melakukan berswadaya gotong royong sudah melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan masyarakat menyambut dengan baik yang telah dilakukan lurah untuk pentingnya berswadaya gotong royong. Upaya pemberdayaan secara berswadaya dan bergotong-royong dilakukan kerja bakti di sekitar lingkungan Kelurahan dan kegiatan tersebut dilakukan 1 bulan 2 kali, dan perangkat Kelurahan memberikan informasi kepada setiap ketua RT agar mereka dapat menyampaikan kembali kepada masyarakat di masing-masing RT. Lurah selalu mengajak warga masyarakat untuk gotong royong baik itu membersihkan Kelurahan ataupun melakukan perbaikan jalan yang dilakukan setiap musim

secara bergotong royong agar dapat menjalin hubungan yang erat antar masyarakat. Hampir setiap kegiatan yang ada di Kelurahan selalu dikerjakan gotong royong seperti halnya pembuatan saluran irigasi karena selain sebagai petani dan perkebunan masyarakat adalah buruh bangunan sehingga dapat menghemat pengeluaran biaya.

Faktor Penghambat Peran Lurah Dalam Penanggulangan Dampak Sosial Pasca Penghentian Pengelolaan Tambang di Kelurahan Dondang Kabupaten Kutai Kartanegara

Partisipasi Penduduk masih terbatas

Lurah mengalami kendala dalam pemberdayaan masyarakat salah satunya yaitu kurang partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan, tetapi Lurah berusaha keras untuk selalu mendekati diri kepada masyarakat melalui bincang-bincang agar masyarakat dapat ikut aktif dalam program pemberdayaan. Kemudian kurangnya partisipasi merupakan tantangan terbesar dalam pemberdayaan masyarakat, karena kebanyakan masyarakat sibuk dengan urusan mereka sendiri padahal program pemberdayaan yang dilakukan Lurah untuk kepentingan masyarakat, tetapi dalam hal ini Lurah tidak menyerah begitu saja yang selalu mengajak warganya sedikit demi sedikit masyarakat mulai terbuka dan sadar untuk ikut dalam berpartisipasi dalam pemberdayaan.

Sarana dan Prasarana Terbatas

Dalam melakukan penyuluhan pertanian masyarakat tidak begitu paham karena tidak menggunakan layar LCD tetapi hanya dilakukan penjelasan sehingga masyarakat tidak paham dengan penjelasan yang diberikan, hal ini sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat dan berdampak pada program pemberdayaan. Faktor fasilitas atau peralatan teknologi mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pencapaian pembangunan. Semakin lengkap dan canggih fasilitas atau peralatan teknologi yang tersedia di Kelurahan akan membuat partisipasi masyarakat akan meningkat, sebaliknya semakin tidak lengkap fasilitas dan peralatan yang tersedia akan membuat partisipasi masyarakat menurun.

Kemampuan SDM Belum memadai

Peningkatan Sumber Daya yang ada dalam suatu tempat sangat diperlukan guna memajukan perkembangan pembangunan yang sedang berlangsung, Sumber daya Manusia memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu wilayah. SDM merupakan segala potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif, serta mampu mengelola dirinya serta seluruh potensi yang dimiliki disekitarnya.

Faktor penghambat yang dihadapi lurah dondang adalah, penerbitan izin yang belum ada untuk memanfaatkan lahan bekas tambang untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga kemampuan masyarakat yang tadinya

bisa dikembangkan dalam hal bertani dan berkebun akan terhambat, upaya masih terus dilakukan oleh pemerintah kelurahan untuk mendapatkan izin, sehingga dalam menaggulangi dampak sosial yang timbul bisa diminimalisir.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Peran Lurah dalam memanfaatkan potensi sumber daya untuk kepentingan pembangunan di Kelurahan dilakukan melalui pengembangan kreatifitas Ibu-ibu PKK dalam kelompok becocok tanam sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pemberdayaan masyarakat tani dengan cara penyediaan bibit, bantuan pemeliharaan dan mendatangkan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan sehingga mendapat pengetahuan baru serta memperaktekannya guna untuk meningkatkan hasil pertanian, dan mampu memanfaatkan lahan bekas tambang.
2. Lurah Dondang dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada program pembangunan telah dilakukan dengan memberi peluang serta kesempatan kepada masyarakat mengusulkan program pembangunan melalui Pramusrenbang Kelurahan dan memuatkannya dalam program pembangunan Kelurahan melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan.
3. Peran Lurah dalam menumbuh kembangkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berswadaya dan gotong-royong dalam pembangunan di lakukan melalui adanya keterlibatan masyarakat serta dukungan masyarakat dan partisipasi masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Lurah melakukan penyusunan kegiatan pembangunan secara partisipatif telah melibatkan masyarakat. Lurah bukan hanya melibatkan Lembaga serta tokoh-tokoh yang ada di masyarakat dalam perencanaan pembangunan tetapi juga melibatkan masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu untuk terlibat aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan di Kelurahan.
4. Faktor Penghambat Peran Lurah dalam Penanggulangan Dampak Sosial Pasca Penghentian Pengelolaan Tambang di Kelurahan Dondang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kemampuan Sumber Daya Manusia yang perlu ditingkatkan. Fasilitas atau peralatan adalah kendala yang dihadapi oleh Lurah dalam melaksanakan peranannya. Semakin lengkap dan canggih fasilitas atau peralatan teknologi yang tersedia di Kelurahan akan membuat partisipasi masyarakat akan meningkat, sebaliknya semakin tidak lengkap fasilitas dan peralatan yang tersedia akan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat.

Saran

1. Hendaknya Lurah Dondang dapat memanfaatkan potensi sumberdaya untuk kepentingan pembangunan di Kelurahan hal ini sangat berpengaruh dalam mewujudkan kemandirian masyarakat, agar masyarakat dapat mengembangkan potensi sumberdaya yang ada, oleh karena itu perlu adanya optimalisasi kegiatan yang dilakukan Lurah Dondang serta dukungan dari

- berbagai pihak juga perlu agar dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan tercapainya tujuan yang di inginkan.
2. Lurah Dondang perlu meningkatkan penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan beberapa pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, serta perusahaan di wilayah Dondang yang masih aktif, yang nantinya diharapkan bisa membantu proses pembangunan yang ada di Kelurahan Dondang.
 3. Peningkatan peranan Lurah dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan lagi, agar warga masyarakat Kelurahan lebih berdaya dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Selain itu perlu juga peningkatan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adimihardja, Harry. 2001. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. CV. Citra Utama, Jakarta.
- Beratha, Nyoman I. 2004. *"Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan"*, Jakarta Ghalia Indonesia.
- Fillah, A Salim. 2005. *Pertambangan dan Mineral Daerah*. Jakarta :Aksara Karunia.
- Horton dan Hunt. 2003. *Pokok-pokok Pemikiran dalam Sosiologi*. Raja Grafindo, Persada: Jakarta
- Koenig, Samuel. 2004. *Prinsip - prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta: Bina Aksara.
- Manan dan Saleng. 2004. *antropolog, Psikologi Kepemimpinan*, Penerbit Rineka Cipta.
- Rawlin dan Wiliam. 2006. *Teori Peranan Konsep Derivasi dan Implikasinya*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Soekanto. 2009. *Teori Peranan Konsep Derivasi dan Implikasinya*. PT Gramedia PustakaUtama: Jakarta.
- Soenardjo, R.H. Unang. 1984. *Tinjauan Singkat Tentang: Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Tarsito*, Bandung.
- Soemardjan, Selo. 2007. *Prinsip - prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta: Bina Aksara.
- Sukandarrumidi. 1995. *Batubara dan Gambut, Gajah Mada University Press*, Yogyakarta.
- Zaufani, Sztompka. 2010 . *Formulasi Ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*, Edisi Kedua, Jakarta: Bumi Aksara

Dokumen-dokumen:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 Tentang
Kelurahan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah